

## SIARAN PERS

### **PENTINGNYA PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI INDONESIA** **Gelar Kuliah Umum di Universitas Gajah Mada**

---

Yogyakarta, 25 September 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengampanyekan pentingnya upaya penguatan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) di sektor jasa keuangan untuk semakin memperbaiki penerapan governansi yang diperlukan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK Sophia Wattimena dalam kegiatan Kuliah Umum dengan tema “Peran OJK dalam Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin.

Dalam pemaparannya, Sophia menyampaikan Laporan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2019 menunjukkan bahwa nilai Corporate Governance Indonesia relatif masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya, sehingga perlu upaya bersama untuk segera memperbaikinya.

Di sektor jasa keuangan, penguatan governansi dilakukan melalui penerapan *three lines model* tidak hanya di industri jasa keuangan, tetapi juga di internal OJK sebagai satu ekosistem agar penerapan tata kelola, manajemen risiko dan manajemen anti-penyuapan dapat berjalan dengan baik.

“Tata kelola yang baik diterapkan melalui konsep *three lines model* yaitu pengawasan oleh pelaku usaha jasa keuangan, lembaga penunjang profesi dan OJK sebagai regulator, yang didukung integritas tinggi. Dengan penerapan *three lines model* secara efektif, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi *stakeholders* sehingga dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, mengurangi level korupsi di Indonesia dan mencegah ekonomi biaya tinggi dan bisnis yang tidak efisien,” kata Sophia.

OJK juga mendorong penerapan Manajemen Anti *Fraud* dan Anti Penyuapan, baik di internal OJK dan para Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Salah satunya dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) OJK yang menerapkan ISO 370001 tentang anti penyuapan. OJK juga terus mendorong Manajemen Anti *Fraud* dan Anti Penyuapan diterapkan secara wajib di sektor jasa keuangan.

Terbaru, OJK telah memperkuat governansi pelaku usaha jasa keuangan melalui POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. POJK ini diterbitkan mengingat tata kelola merupakan hal yang sangat fundamental dalam pengelolaan kegiatan usaha suatu bank untuk dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai, etika, prinsip, dan menjunjung tinggi integritas.

Kegiatan Kuliah Umum dihadiri oleh 2.000 lebih mahasiswa secara daring dan luring serta jajaran Pimpinan Kantor Pusat dan Pimpinan Wilayah Kerja OJK Provinsi DIY, Jajaran Pimpinan/Rektorat Universitas di Yogyakarta serta diikuti oleh civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi di Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Widya Mataram, Universitas

Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta (STIE YKPN), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta (STIM YKPN), dan universitas lainnya.

Rektor Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gajah Mada, Gumilang Aryo Sadewo, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran OJK untuk memberikan pemahaman mengenai penguatan tata kelola dan sektor jasa keuangan kepada para Mahasiswa.

“Kami FEB bangga bisa berkolaborasi dengan OJK untuk menyelenggarakan seminar sore hari ini. Ini momen luar biasa tidak hanya mahasiswa satu fakultas dan universitas tapi dari beberapa fakultas dan universitas secara sekaligus dalam satu acara. Kami berharap juga dengan governansi yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif untuk bisa mengatasi isu *sustainability* di Indonesia,” kata Gumilang.

Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi DIY, Sophia juga memberikan *keynote speech* dalam acara Forum Penguatan Governansi dan Penegakan Integritas Sektor Jasa Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan Industri Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi Daerah dan Asosiasi PUJK dan Asosiasi Profesi di wilayah Kantor OJK Provinsi DIY.

Forum tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Beny Suharsono yang menyampaikan apresiasi kepada OJK dan dukungan dari pemerintah daerah atas setiap upaya OJK memperkuat governansi dan integritas di sektor jasa keuangan khususnya wilayah kerja di DIY, yang diharapkan akan berdampak positif serta signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi - Aman Santosa;  
Telp. (021) 29600000; Email: [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id)